

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Studi Kasus di SDN Pulogadung 01 Pagi

Titania Susandri¹, Abdullah Jawas¹, Ekky Kurnia Ramadhan¹, Fidha Nazifah¹,
Hadana Putri Fadillah¹

¹Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms, levels, and contributions of community participation in educational implementation at SDN Pulogadung 01, East Jakarta. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through interviews with the school principal, document analysis, and a review of relevant literature. The findings indicate that community participation involves parents, the school committee, neighborhood organizations, alumni, and local community members in planning, implementation, monitoring, and evaluation of school programs. The dominant forms of participation include providing feedback, moral support, and social oversight. Community involvement has reached the levels of information sharing, consultation, and collaboration, but has not yet achieved empowerment, as community members have limited authority in strategic school decision-making. The study also reveals that participation is stronger during program implementation than in monitoring and evaluation activities. This article highlights that community participation should not be measured solely by attendance at school forums, but also by meaningful involvement in decision-making, monitoring, and evaluation processes. Therefore, strengthening community capacity, optimizing the role of school committees, and promoting more participatory communication are necessary to support transparent and accountable school governance.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 22-05-2026

Revised: 19-06-2026

Accepted: 27-06-2026

KEYWORDS

empowerment,
community
participation,
educational quality,
school-based
management, school
management

Corresponding Author:

Titania Susandri

Educational Management, Faculty of Education, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: titania.susandri@mhs.unj.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (Mustaqim, 2016).

Namun demikian, dalam praktiknya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlibatan masyarakat sering kali terbatas pada dukungan finansial atau partisipasi dalam kegiatan tertentu, sementara keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan program sekolah, dan evaluasi pendidikan masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara kolaboratif sehingga dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah (Widiyanto, 2019).

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menempatkan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan pendidikan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi dukungan sumber daya, tetapi juga sebagai mitra strategis yang dapat memberikan masukan, pengawasan, dan kontrol sosial terhadap jalannya program pendidikan. Keterlibatan yang optimal diyakini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan sekolah (Susanto dkk., 2020).

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran komite sekolah atau pengaruh partisipasi masyarakat terhadap mutu pendidikan secara umum. Masih terbatas penelitian yang mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar, khususnya yang mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah secara terpadu. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai praktik partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Khausar & Anwar, 2023).

SDN Pulogadung 01 Pagi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang memiliki interaksi yang erat dengan masyarakat sekitar dan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah, orang tua peserta didik, serta berbagai bentuk kerja sama dengan lingkungan sekitar menjadikan sekolah ini relevan untuk diteliti sebagai studi kasus mengenai implementasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, penelitian pada tingkat sekolah dasar penting dilakukan karena pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pendukung sekolah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Pulogadung 01 Pagi, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah, serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap pengembangan program pendidikan di sekolah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem terikat secara mendalam melalui pengumpulan berbagai data, dengan fokus utama menyelidiki sebuah kasus yang memiliki batasan jelas dari segi waktu, tempat, atau kondisi fisik. Kasus yang diteliti ini bisa sangat bervariasi, mulai dari seorang individu, program, aktivitas, institusi sekolah, ruang kelas, hingga kelompok masyarakat tertentu. Setelah batasan kasus tersebut ditetapkan dengan jelas, peneliti akan menginvestigasinya secara mendalam memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti melakukan wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumentasi (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Lokasi studi kasus berfokus pada SDN Pulogadung 01 Pagi. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti komite sekolah, orang tua peserta didik, RT/RW, Dasawisma, dan masyarakat sekitar sekolah. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala SDN Pulogadung 01 Pagi sebagai informan utama serta didukung oleh studi dokumentasi dan kajian literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan fokus pada identifikasi bentuk partisipasi masyarakat, tingkatan partisipasi masyarakat, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan dan mutu pendidikan di sekolah.

Hasil dan Diskusi

1. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keterlibatan orang tua peserta

didik, komite sekolah, RT/RW, Dasawisma, alumni, serta berbagai lembaga di lingkungan sekitar sekolah. Keterlibatan tersebut terlihat dalam pemberian masukan terhadap program sekolah, dukungan terhadap kegiatan peserta didik, pengawasan lingkungan sekolah, hingga penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi siswa.

Berdasarkan bentuknya, partisipasi masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi terdiri atas partisipasi fisik dan nonfisik. Partisipasi fisik diwujudkan melalui dukungan tenaga dan fasilitas, seperti membantu menjaga keamanan lingkungan sekolah, mendukung kegiatan kebersihan dan penghijauan, serta keterlibatan alumni dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, partisipasi nonfisik lebih dominan, yaitu berupa pemberian saran, kritik, masukan, pengawasan, serta dukungan moral terhadap berbagai program sekolah.

Jika ditinjau dari tingkat partisipasinya, masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi telah mencapai tingkat informasi, konsultasi, dan kolaborasi. Pada tingkat informasi, sekolah secara rutin menyampaikan berbagai program dan kegiatan kepada masyarakat melalui rapat maupun komunikasi dengan orang tua dan komite sekolah. Pada tingkat konsultasi, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap program sekolah. Adapun tingkat yang paling dominan adalah kolaborasi, yang terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah serta penyelesaian permasalahan peserta didik.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi belum mencapai tingkat pemberdayaan karena masyarakat belum memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis sekolah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat lebih tepat dikategorikan pada tingkat kolaborasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan sebagai mitra sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Temuan di SDN Pulogadung 01 Pagi menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan belum sampai ke tahap pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat umumnya terbatas pada dukungan teknis dan sosial tanpa keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dikritisi oleh Fawwaz dan Susanty (2024). Suryana Dkk. (2022) menegaskan bahwa partisipasi sejati mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga pemantauan dan evaluasi. Namun demikian, keterlibatan masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan program, sedangkan partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi masih belum berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi belum mencapai tahap pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Partisipasi masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat telah mencapai tingkat kolaborasi, meskipun belum

berkembang menjadi tahap pemberdayaan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terlihat melalui kehadiran dalam rapat atau penerimaan informasi mengenai program sekolah, tetapi juga melalui dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah, penyelesaian permasalahan peserta didik, pemeliharaan keamanan lingkungan, serta kerja sama dengan RT/RW, Dasawisma, alumni, dan berbagai lembaga di sekitar sekolah.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Suryana dkk. (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, tenaga, dan dukungan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, keterlibatan tersebut masih terbatas pada pelaksanaan program dan pemberian masukan, sementara masyarakat belum memiliki kewenangan yang signifikan dalam perencanaan, pengambilan keputusan strategis, maupun monitoring dan evaluasi program sekolah. Partisipasi masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi lebih tepat dikategorikan sebagai partisipasi kolaboratif yang cukup baik, tetapi belum mencapai partisipasi berbasis pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra setara dalam tata kelola pendidikan.

Meskipun sekolah telah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai mekanisme formal dan informal, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan masih perlu terus diperkuat agar partisipasi masyarakat dapat berkembang menuju tahap pemberdayaan yang lebih substantif. Keterbukaan informasi mengenai program sekolah, pelaksanaan kegiatan, serta hasil evaluasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan. Sejalan dengan pendapat Suryana dkk. (2022), keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.

Komunikasi antara sekolah dan masyarakat di SDN Pulogadung 01 Pagi pada dasarnya telah berlangsung secara dua arah, baik melalui komunikasi formal maupun informal. Meskipun forum atau pertemuan resmi yang melibatkan masyarakat dilaksanakan secara insidental sesuai kebutuhan sekolah, interaksi sehari-hari antara pihak sekolah dan masyarakat terjalin cukup intens melalui hubungan yang akrab dan saling membaur. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbukaan sekolah dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Namun, komunikasi yang bersifat formal dan terstruktur masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dapat terwadahi secara lebih sistematis. Suryana dkk. (2022) menekankan bahwa komunikasi yang efektif dan musyawarah bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun partisipasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan forum komunikasi formal secara berkala dapat menjadi upaya untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Ketimpangan latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat menjadi faktor pembatas partisipasi yang signifikan. Sebagian besar warga sekitar SDN Pulogadung 01 Pagi tergolong ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang beragam, sehingga perhatian mereka lebih terfokus pada kebutuhan sehari-hari. Suryana Dkk. (2022) mencatat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif di dunia pendidikan dapat menyebabkan pendidikan hanya dikontrol oleh lembaga pendidikan semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan ini juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami dan merespons kebijakan sekolah secara kritis.

Peran komite sekolah memiliki posisi penting dalam menjembatani hubungan antara sekolah dan masyarakat. Di SDN Pulogadung 01 Pagi, fungsi komite sekolah masih dapat diperkuat, terutama dalam aspek advokasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat agar partisipasi masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. Suryana dkk. (2022) menegaskan bahwa komite sekolah seharusnya terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan program, hingga pembahasan hasil evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komite sekolah perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih substantif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Pulogadung 01 Pagi menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara sekolah dan lingkungan sekitar. Hal ini dilihat dari kontribusi masyarakat berkontribusi melalui pemberian masukan, dukungan keamanan, penyelesaian masalah peserta didik, hingga keterlibatan dalam berbagai program sekolah. Namun, partisipasi tersebut masih didominasi oleh bentuk dukungan konsultatif dan sosial, sementara keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi program belum berlangsung secara optimal. Selain itu, mekanisme penyampaian aspirasi yang masih mengandalkan komunikasi informal berpotensi membatasi keberlanjutan partisipasi karena sangat bergantung pada kedekatan personal antara pihak sekolah dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik belum sepenuhnya diikuti oleh sistem partisipasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keterbatasan sosial ekonomi dan rendahnya akses sebagian orang tua terhadap teknologi menjadi tantangan dalam membangun keterlibatan yang lebih luas dan merata. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi masyarakat lebih banyak terlihat pada aspek keamanan, pembentukan karakter, dan dukungan terhadap kegiatan sekolah dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran. Padahal, potensi masyarakat sebagai mitra strategis pendidikan dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk mendukung proses belajar, pengembangan literasi, maupun penguatan prestasi peserta didik.

Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan setempat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan akses teknologi yang lebih merata, program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, serta penguatan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan sekolah, tetapi juga menjadi kekuatan penting yang berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan keberhasilan belajar peserta didik.

2. Keterkaitan dengan Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat dalam memastikan seluruh proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang diinginkan. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan institusi pendidikan dan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun non finansial. Muktamar et al. (2023) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses sistematis dalam mengelola kerja sama antarindividu di dalam lembaga pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Wakila (2021) menekankan bahwa inti dari manajemen ini adalah menetapkan target organisasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada agar tujuan tersebut dapat diraih secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disintesis bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses sistematis dalam mengelola sumber daya yang dimiliki melalui kolaborasi setiap individu yang ada di dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Studi kasus di SDN Pulogadung 01 Pagi menggambarkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Keterkaitan manajemen pendidikan dalam tahap perencanaan di SDN Pulogadung 01 Pagi diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat sekitar secara formal maupun nonformal. Mekanisme perencanaan secara formal dilaksanakan melalui pertemuan rapat, sedangkan mekanisme non formal dilakukan melalui percakapan atau ngobrol-ngobrol santai. Melalui saluran komunikasi tersebut, sekolah secara aktif menerima dan menghimpun berbagai aspirasi serta masukan dari masyarakat, baik yang disampaikan langsung kepada kepala sekolah maupun melalui tim humas sekolah. Sebagai contoh riil dalam perencanaan, sekolah melibatkan pihak RW dan dawas untuk menentukan jumlah rombongan belajar (rombel) yang akan dibuka. Setiap aspirasi yang masuk tidak langsung diterapkan, tetapi disaring dan disesuaikan terlebih dahulu dengan visi, misi, serta kebijakan yang dimiliki sekolah. Jika aspirasi tersebut sejalan dengan kebijakan sekolah, maka akan diterapkan. Namun, jika bertentangan atau tidak sesuai, maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan.

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat bergerak pada ranah akademik dan non akademik guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif. Dalam kegiatan akademik, bentuk dukungan nyata masyarakat terlihat saat periode pelaksanaan ujian berlangsung. Warga sekitar SDN Pulogadung 01 Pagi membantu menjaga kekondusifan suasana sekolah dengan tidak menimbulkan suara-suara yang dapat mengganggu, meskipun biasanya masyarakat cukup heboh ketika berbincang sehari-hari. Hubungan harmonis ini dapat terbangun karena pihak sekolah menggunakan pendekatan dengan berbaur dan berbincang santai dengan masyarakat.

Sementara itu, dalam kegiatan non akademik, masyarakat berpartisipasi aktif membantu sekolah dalam kegiatan kerja bakti serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Pihak sekolah juga kerap menyampaikan keluhan terkait sampah kepada beberapa perwakilan masyarakat, yang kemudian dibantu dengan cara menyampaikannya kepada pihak terkait. Selain itu, warga juga memberikan dukungan fasilitas berupa penyediaan tempat parkir kendaraan saat kegiatan sekolah berlangsung, yang sangat bermanfaat sekali mengingat wilayah sekolah yang relatif kecil. Terkait dukungan dalam bentuk uang, kepala sekolah menerapkan kebijakan tegas untuk menolak dan tidak menerima segala bentuk dukungan dari masyarakat yang berbentuk dana atau bantuan uang. Kepala sekolah menegaskan bahwa penolakan bantuan dana ini dilakukan karena berpotensi menimbulkan permasalahan administratif dan sosial. Oleh karena itu, seluruh kontribusi yang diberikan oleh masyarakat lebih banyak berupa dukungan non material.

Dalam fungsi pengawasan, sekolah juga turut mengintegrasikan peran serta masyarakat. Fungsi kontrol ini berjalan melalui kepedulian serta perhatian masyarakat terhadap berbagai aktivitas sekolah. Warga sekitar berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Salah satu implementasi nyata dari fungsi pengawasan ini adalah keterlibatan pihak RT dan linmas dalam membantu mengawasi serta mengamankan jalannya program MBG (Makan Bergizi Gratis). Pengawasan eksternal dari masyarakat ini menjadi sangat krusial mengingat makanan tidak diantar ke sekolah dengan menggunakan mobil, tetapi menggunakan gerobak akibat akses jalan yang sempit.

Pada tahap evaluasi, manajemen sekolah menunjukkan sikap yang sangat terbuka terhadap berbagai kritik, saran, dan masukan yang berasal dari masyarakat. Mekanisme penyampaian evaluasi ini dilakukan secara terbuka melalui komunikasi langsung, baik melalui pertemuan tatap muka, telepon, maupun percakapan sehari-hari. Kepala sekolah secara aktif membangun kedekatan dengan masyarakat untuk memperoleh informasi dan masukan mengenai kondisi sekolah maupun lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tahap perencanaan, setiap masukan evaluasi yang diberikan masyarakat akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan visi, misi, serta kebijakan sekolah. Salah satu contoh implementasi dari masukan evaluasi masyarakat adalah

penyelenggaraan kegiatan penutupan MPLS yang melibatkan kerja sama dengan pihak TNI dan Damkar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut nyata dari usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat pada tahun sebelumnya, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan peserta didik dalam pelaksanaannya. Selain masyarakat sekitar, para alumni juga turut terlibat dalam kegiatan sekolah meskipun belum dalam bentuk formal, seperti membantu mendampingi kegiatan ekstrakurikuler dan latihan tertentu.

3. Implikasi Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan

Implikasi terhadap pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis sebagai stakeholder aktif dalam sistem pendidikan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan pendidikan, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui dukungan lingkungan yang kondusif, pengawasan sosial, serta partisipasi dalam berbagai program sekolah (Wulansari et al., 2021). Oleh karena itu, pendayagunaan masyarakat perlu diarahkan pada upaya membangun kemitraan yang berkelanjutan antara sekolah dan lingkungan sekitar.

Studi kasus di SDN Pulogadung 01 Pagi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dilakukan melalui berbagai pihak, seperti komite sekolah, orang tua siswa, RT/RW, Dasawisma, FKDM, LMK, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SDN Pulogadung 01 Pagi, masyarakat dilibatkan dalam berbagai program sekolah, mulai dari pengelolaan lingkungan sekolah, program pengelolaan sampah, keamanan sekolah, hingga penanganan permasalahan peserta didik yang memerlukan koordinasi dengan masyarakat sekitar (Hasil Wawancara Kepala SDN Pulogadung 01 Pagi, 2026). Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan program sekolah melalui rapat formal maupun komunikasi informal dengan RT/RW dan Dasawisma untuk memperoleh data serta informasi yang mendukung kebutuhan sekolah, seperti perencanaan penerimaan peserta didik baru dan pemetaan calon siswa di lingkungan sekitar .

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan dampak positif bagi sekolah, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung pelaksanaan program pendidikan. Masyarakat turut membantu menjaga keamanan sekolah, memberikan informasi terkait kondisi lingkungan sekitar, serta menjadi mitra sekolah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Kepala sekolah menyatakan bahwa hubungan yang baik dengan masyarakat membuat sekolah lebih mudah memperoleh dukungan dalam menjalankan program-program pendidikan dan kegiatan sekolah .

Namun demikian, efektivitas partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah. Partisipasi perlu dikelola secara sistematis agar menghasilkan dampak yang optimal. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun forum komunikasi rutin antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk membahas kebutuhan pendidikan, evaluasi program, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul. Forum tersebut dapat menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan (Fathurrahman, 2020).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi yang lebih terarah melalui edukasi kepada warga mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mendukung pendidikan. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi pendidikan, pelatihan bagi komite sekolah terkait fungsi advokasi dan pengawasan, serta pembentukan forum warga sekolah yang dapat menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Selain itu, sekolah juga perlu melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan di lingkungan sekitar agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam pendidikan. Sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dan keterbatasan akses teknologi yang berdampak pada komunikasi antara sekolah dan orang tua peserta didik. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sekolah dalam membangun partisipasi masyarakat yang optimal sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Dari sisi tata kelola, partisipasi masyarakat akan lebih efektif apabila didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas. Komite sekolah perlu difungsikan secara optimal sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan sekolah. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam monitoring program sekolah, terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana, lingkungan sekolah, dan kegiatan yang melibatkan warga sekitar. Transparansi juga perlu diperkuat melalui penyampaian laporan kegiatan, penggunaan dana, dan progres program sekolah secara terbuka kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.

Dengan demikian, implikasi pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terletak pada tingginya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga pada bagaimana partisipasi tersebut dikelola secara efektif melalui komunikasi yang terbuka, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan fungsi komite sekolah, keterlibatan dalam pengawasan, serta transparansi penyelenggaraan pendidikan. Melalui upaya tersebut, kemitraan

antara sekolah dan masyarakat dapat terbangun secara lebih kuat dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di SDN Pulogadung 01 Pagi.

Simpulan

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam tata kelola sekolah, namun praktiknya di SDN Pulogadung 01 Pagi masih bersifat parsial. Keterlibatan warga, komite, dan alumni sejauh ini baru mencapai tahap kolaborasi operasional dan belum menyentuh tingkat pemberdayaan yang substantif. Kontribusi masyarakat ditemukan sangat kuat pada tahap pelaksanaan program dan dukungan non material, tetapi masih minim dalam proses pengambilan keputusan strategis, pengawasan, serta evaluasi program sekolah.

Rendahnya keterlibatan pada fungsi kontrol ini dipicu oleh beberapa hambatan utama, seperti pola komunikasi satu arah yang bersifat insidental, peran komite sekolah yang sebatas pemenuhan administratif, kurangnya transparansi informasi, serta kendala sosial-ekonomi warga yang membatasi keterlibatan kritis mereka. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan penguatan kapasitas kemitraan melalui komunikasi dua arah yang inklusif, optimalisasi fungsi advokasi komite, serta penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berbasis pada serapan aspirasi nyata warga.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada studi kasus tunggal dengan pengumpulan data yang terbatas pada wawancara kepala sekolah, studi dokumentasi, dan kajian literatur, tanpa melakukan observasi langsung yang meluas terhadap komunitas warga. Atas dasar tersebut, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menguji langsung dinamika partisipasi masyarakat di sekolah atau desa melalui pengumpulan data lapangan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara langsung.

Referensi

- Abdullah, M. (2018). Manajemen mutu pendidikan di sekolah: Peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 190–198.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fathurrahman, F. (2020). Optimalisasi kinerja komite sekolah dalam pengelolaan satuan unit pendidikan. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(1), 40–50.
- Fawwaz, A., & Susanty, S. (2024). Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan menuju sekolah bermutu. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 221–238. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i2.16291>

- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Khausar, K., & Anwar, S. (2023). Partisipasi komite sekolah dalam mengawasi mutu pendidikan. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2).
- Latif, M., & Latief, S. (2018). Teori manajemen pendidikan. *Prenada Media*.
- Muktamar, A., Iswahyudi, M. S., Salong, A., Wote, A. Y. V., Rahmatiyah, R., Riyadi, S., Kusumawati, M., Rohaeti, L., & Leuwol, F. S. (2023). Manajemen pendidikan: Konsep, tantangan, dan strategi di era digital. *PT Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Muhamad Yasin, Y., Aswasulasikin, A., Apriana, D., & Sururuddin, M. (2021). Pola komunikasi sekolah dengan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Mustaqim, M. (2016). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1), 245–275.
- Nur, M., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2022). Manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat SD. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 23–30.
- Prabandari, D. A., Supriyanto, A., Sobri, A. Y., & Fadhli, R. (2021). Strategi humas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3(2), 179–191.
- Purqon, M., & Mukhlis. (2022). Hak dan kewajiban masyarakat menyelenggarakan pendidikan: Analisis RUU Sisdiknas Tahun 2022. *Journal of Education Research*, 5(1), 55–63. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.681>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Rizal, S., Yusuf, M., Attahmid, A. N. A. U., & Khaliq, A. (2024). Pengantar manajemen. *Widina Media Utama*.
- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan sosial dan pembangunan pendidikan berbasis masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 74–84. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.217>
- Sukinawan, K., Karwanto, K., Widodo, B. S., Khamidi, A., Haq, M. S., & Amalia, K. (2025). Peran strategis komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Tinjauan literatur. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3974–3982.
- Suryana, N., Mumuh, & Hilman, C. (2022). Konsep dasar dan teori partisipasi pendidikan.

<https://doi.org/10.62491/sjss.v3i1.2026.95>

Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran, 2(2), 61–67.
<https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.219>

Susanto, D., Mashuri, M., & Hanum, F. (2020). Partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 7 Kediri dalam perspektif pelayanan publik. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 4(2).

Triwiyanto, T., Nurabadi, A., Sumarsono, R. B., Kusumaningrum, D. E., & Arafik, M. (2023). Sistem manajemen pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan mutu sekolah dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 7(1), 117–125.

Wakila, Y. F. (2021). Konsep dan fungsi manajemen pendidikan. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(1), 43–56.

Widyanto, I. P. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perkembangan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). *Satya Sastraharing*, 3(2), 93–112.

Wulansari, S., Gaffar, M. F., Komariah, A., & Suryadi, S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.

Yusanto, Y. (2020). Ragam pendekatan penelitian kualitatif. *Journal of Computer Security*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>